

# BAB I

## PENDAHULUAN UMUM

### 1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan sikap. Bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi (*ideational*), membangun interaksi sosial (*interpersonal*), dan menyatukan makna ke dalam konteks teks (*textual*) (Fitriana, 2021: 100). Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan ide, kritik, dukungan, maupun protes terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kajian linguistik pragmatik, khususnya teori tindak tutur, bahasa tidak hanya dipahami sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang memiliki maksud dan dampak tertentu (Haryanti, 2019: 2). Selain dalam komunikasi langsung, bahasa juga berperan penting di dunia maya, terutama di media sosial, sebagai wadah interaksi dan ekspresi masyarakat modern.

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui berbagai platform seperti *Instagram*, *X (Twitter)*, *Facebook*, *TikTok*, *YouTube*, dan *WhatsApp*, manusia dapat berinteraksi, berbagi informasi, membangun identitas diri, hingga membentuk opini publik. Di balik setiap unggahan, komentar, dan pesan yang tersebar di dunia maya, bahasa memegang peran yang sangat penting. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana untuk membangun hubungan sosial, mengekspresikan emosi, dan menunjukkan jati diri pengguna di dunia digital (Zappavigna, 2012: 2).

Media sosial telah menjadi ruang komunikasi publik yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan opini, sikap, dan identitas sosial melalui pola penggunaan bahasa yang sering kali lebih ekspresif, interaktif dan persuasif. Platform seperti *Facebook* bukan hanya menjadi sarana berbagi informasi, melainkan juga arena pertukaran ide, kritik sosial, dan pembentukan opini publik. Penggunaan bahasa pada platform tersebut bersifat dinamis, spontan dan sering kali dengan makna implisit. Dalam konteks politik, media sosial telah menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam proses politik dan penyelenggaraan

pemilu. Platform media sosial tidak lagi sekadar wadah untuk berbagi momen pribadi, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat berlangsungnya diskusi politik, kampanye kandidat, dan pertukaran informasi seputar proses demokrasi (Zappavigna, 2012:2-5). Di Indonesia, media sosial bahkan menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh berita politik dan perkembangan pemilu, menggeser dominasi media konvensional seperti televisi atau surat kabar.

Pemilu merupakan momen politik penting yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Dasar hukum mengenai netralitas ASN diatur secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**. Secara spesifik, **Pasal 2 huruf f** menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah 'netralitas'. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, **Pasal 9 ayat (2)** juga mewajibkan Pegawai ASN untuk bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Montheza dkk., 2024:7). Netralitas ini juga tercermin dalam penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang harus menghindari keberpihakan. Misalnya, ASN sebaiknya menggunakan ungkapan “mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil” daripada “mendukung kandidat terbaik.” Pemilihan kata yang netral membantu menjaga kepercayaan publik terhadap profesionalisme ASN. Dengan demikian, netralitas ASN menjadi prinsip fundamental dalam memastikan proses demokrasi berlangsung adil dan tidak memihak (Amir & Hertanto, 2023:473).

Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah pelanggaran netralitas ASN, terutama dalam konteks pemilu. Netralitas ASN merupakan prinsip penting yang menjamin aparatur negara tidak memihak pada pihak tertentu demi menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Namun, posisi ASN sering kali berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka merupakan pegawai yang diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik (Amir & Hertanto, 2023: 467), sehingga pekerjaan mereka kerap dikaitkan dengan kepentingan politik. Di sisi lain, ASN dituntut untuk tetap netral agar profesional dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan

pelayanan publik. Isu mengenai netralitas ASN diperkirakan akan terus muncul pada setiap penyelenggaraan pemilu berikutnya (Mokhsen, 2019:12).

Dalam ekosistem birokrasi Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memegang peranan vital sebagai penjaga integritas aparatur negara. KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaga ini memiliki mandat strategis untuk mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, serta menjamin penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Salah satu fungsi krusial KASN adalah memastikan prinsip netralitas ASN tetap tegak, terutama di tengah kontestasi politik, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan birokrasi.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada Pemilu 2019, KASN secara rutin mempublikasikan hasil temuan dan penanganan pelanggaran melalui saluran komunikasi resminya, termasuk akun media sosial *Facebook*. Salah satu unggahan yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah postingan mengenai pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh lima belas camat di Kota Makassar. Dalam video yang diunggah tersebut, para camat diduga terlibat dalam kegiatan kampanye dengan secara terbuka mendukung dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

Peristiwa pelanggaran netralitas ASN ini menarik perhatian karena melibatkan camat dalam aktivitas politik yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Sebagai pejabat pemerintahan di tingkat kecamatan, camat memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan kebijakan di wilayahnya (Montheza dkk., 2024:7). Karena itu, menjaga netralitas menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik tertentu. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN merupakan isu penting dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga ASN diharapkan bersikap objektif dan tidak memihak.

Unggahan tersebut segera menimbulkan beragam reaksi dari Warganet. Sebagian pengguna media sosial memberikan dukungan terhadap langkah KASN yang dianggap tegas dalam menegakkan aturan netralitas ASN. Sebagian lainnya justru mengecam tindakan para camat yang dinilai tidak profesional dan

melanggar kode etik sebagai ASN. Di sisi lain, terdapat pula komentar yang bernada skeptis terhadap kinerja lembaga pemerintah dan sistem politik di Indonesia secara umum.

Beragam tanggapan yang muncul di kolom komentar tidak hanya menunjukkan ekspresi pendapat masyarakat, tetapi juga mencerminkan bentuk-bentuk tindak tutur yang berisi sikap, kritik, dukungan, serta ejekan. Dengan demikian, interaksi warganet pada unggahan tersebut menjadi potret bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat menyuarakan opini, menilai kebijakan, dan mengekspresikan posisi mereka terhadap isu-isu politik dan etika birokrasi.

Respons warganet pada postingan tersebut beragam, mulai dari kecaman, saran, dan dukungan terhadap penegakan aturan, hingga sindiran atas pelanggaran yang terjadi. Salah satu komentar yang menunjukkan sikap kritis masyarakat berbunyi sebagai berikut:

*“ASN itu harus netral, tidak usah ngajak pilih si anu dan si anu, cukup pilih di bilik suara aja” (4)*

Komentar ini merupakan representasi dari bentuk kritik warganet terhadap tindakan ASN yang dianggap tidak netral. Penutur menyampaikan pandangannya secara tegas bahwa ASN seharusnya tidak mengarahkan pilihan politik orang lain dan cukup menggunakan hak pilihnya secara pribadi di bilik suara. Pilihan kata *“si anu dan si anu”* menunjukkan bentuk sindiran halus terhadap nama-nama tokoh tertentu, yang sengaja tidak disebutkan secara eksplisit, namun tetap dapat dipahami maksudnya oleh pembaca.

Dari sudut pandang pragmatik, komentar ini mengandung tindak tutur direktif, karena penutur memberi saran sekaligus teguran secara tidak langsung. Selain itu, komentar tersebut juga memuat tindak tutur representatif, karena penutur menyatakan pandangannya tentang apa yang dianggap sebagai sikap ideal bagi seorang ASN. Gaya bahasa yang digunakan juga mencerminkan bentuk kritik sosial yang dibungkus dengan kesantunan pragmatik, tanpa kehilangan ketegasan makna.

Contoh lain komentar warganet yang muncul pada unggahan *Facebook* KASN adalah:

*“Menunggu keberanian Bawaslu menegakkan aturan main yang berlaku.. Berani atau keok.. hhhhh.” (22)*

Komentar ini menarik untuk dicermati karena tidak hanya sekadar berisi kritik, melainkan mencerminkan motif kontrol sosial yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga negara. Penutur secara sadar menggunakan tantangan retorik “berani atau keok” untuk mempertanyakan integritas Bawaslu. Motif di balik komentar ini adalah ekspresi ketidakpercayaan (skeptisisme) publik terhadap konsistensi penegakan hukum, di mana warganet memposisikan diri mereka sebagai pengawas eksternal yang menuntut akuntabilitas.

Secara pragmatik, komentar ini mengandung tindak tutur direktif tak langsung, yaitu desakan agar Bawaslu bertindak tegas, namun disampaikan dalam bentuk sindiran. Selain itu, terdapat tindak tutur ekspresif, yang menunjukkan perasaan skeptis atau sinis penutur terhadap situasi yang sedang terjadi. Unsur “hhhh” di akhir kalimat menambah nuansa sarkastis, yang memperkuat kesan bahwa penutur tidak yakin Bawaslu benar-benar akan bertindak.

Selain komentar yang dikemukakan di atas, warganet juga menggunakan berbagai jenis tindak tutur dalam komentar mereka yang mencerminkan sikap kritis, protes, atau dukungan terhadap pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019. Dari sini muncul hipotesis awal bahwa jenis tindak tutur yang paling dominan dalam komentar *Facebook* terhadap isu pelanggaran netralitas ASN adalah tindak tutur ekspresif dan direktif, karena masyarakat lebih cenderung menyampaikan perasaan dan harapan terhadap institusi pemerintah.

Fenomena ini dapat dikaji melalui pendekatan pragmatik, khususnya teori tindak tutur (*speech acts*) yang dikembangkan oleh Austin dan Searle. Tindak tutur berfokus pada bagaimana ujaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan sosial tertentu seperti memerintah, mengkritik, menyindir, memuji, dan sebagainya. Dalam interaksi digital seperti di *Facebook*, tindak tutur menjadi sarana utama bagi warganet untuk mengekspresikan sikap, emosi, dan ideologi mereka secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana warganet menggunakan bahasa dalam konteks ini, khususnya tentang pelanggaran netralitas ASN.

Implikasinya, fenomena ini menunjukkan pergeseran partisipasi politik di era digital, di mana media sosial bukan lagi sekadar ruang interaksi sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi arena pengadilan publik. Tindak tutur yang digunakan warganet—mulai dari sindiran halus hingga tantangan terbuka—menjadi alat penekan (*pressure group*) yang nyata bagi birokrasi. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan menarik: untuk mengungkap bagaimana bahasa dalam ruang digital digunakan secara strategis oleh masyarakat untuk melawan penyimpangan etika birokrasi dan memengaruhi citra institusi negara.

Media sosial seperti *Facebook* telah menjadi ruang publik digital tempat warganet menyuarakan pendapat, kritik, dan aspirasi terhadap isu-isu sosial-politik, termasuk terkait netralitas ASN dalam pemilu. Dalam konteks ini, pemanfaatan ruang digital tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk terlibat secara aktif dalam wacana politik dan pemerintahan.

Analisis tindak tutur sebagai pendekatan linguistik dapat membantu mengungkap fungsi sosial dan makna yang tersirat dalam komunikasi masyarakat melalui media sosial. Dengan memahami jenis dan fungsi tindak tutur dalam komentar *Facebook* terkait pelanggaran netralitas ASN, dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana masyarakat memaknai dan merespons isu tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui persepsi publik dan potensi pengaruh komunikasi digital terhadap dinamika sosial-politik. Dalam konteks komunikasi modern, terutama di media sosial, tindak tutur menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi yang bersifat multimodal—meliputi teks, gambar, emoji, dan simbol-simbol lainnya (Rahardi, 2021:88). Oleh karena itu, analisis tindak tutur dapat membantu mengungkap bagaimana masyarakat menggunakan bahasa untuk membangun identitas, mempertahankan hubungan sosial, menyampaikan kritik, atau bahkan melakukan persuasi secara halus di ruang digital. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang struktur dan fungsi bahasa, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya yang tercermin melalui praktik berbahasa di media sosial.

Beberapa studi telah mengkaji tindak tutur dalam konteks politik dan pemilu. Nurul Aini (2023) meneliti “strategi kesantunan dalam *talk show* Rosi yang membahas isu penundaan Pemilu 2024”, menggunakan teori tindak tutur Searle dan strategi kesantunan Brown & Levinson. Penelitian ini menemukan variasi tindak tutur—asertif, direktif, ekspresif, dan komisif—serta strategi kesantunan

positif dan negatif yang dipengaruhi oleh posisi sosial dan sikap partisipan. Objek kajian berupa wacana politik formal di televisi yang melibatkan elit politik, sehingga komunikasi berlangsung lebih terstruktur dibanding percakapan sehari-hari.

Sementara itu, Septi Purwanita (2015) meneliti “tindak tutur dalam iklan politik berbahasa Jawa pada Pemilu Legislatif 2014”. Tujuannya untuk mengkaji jenis dan karakteristik tindak tutur dalam iklan politik Pemilu Legislatif 2014 yang disampaikan dalam Bahasa Jawa. Hasil penelitian menunjukkan dominasi tindak tutur direktif (seperti memerintah, mengajak), sedangkan tindak tutur ekspresif bersifat *literal* dan langsung.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*gap*) akademis dalam kajian pragmatik digital. Penelitian terdahulu, seperti Aini (2023) dan Purwanita (2015), cenderung berfokus pada wacana politik formal yang terstruktur (seperti *talk show* televisi) dan komunikasi satu arah (seperti iklan politik), di mana dominasi penutur berada pada elit politik. Selain itu, beberapa studi lain (Oktaviani, 2022; Aprilia dkk., 2024) membatasi analisisnya hanya pada jenis tindak tutur tertentu saja, misalnya hanya meneliti aspek ekspresif atau direktif.

Sebaliknya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memindahkan fokus kajian pada tuturan spontan masyarakat (warganet) di ruang digital yang bersifat egaliter dan interaktif. Penelitian ini secara spesifik membedah respons publik terhadap pelanggaran etika birokrasi (netralitas ASN)— sebuah topik yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dari perspektif pragmatik. Lebih jauh, penelitian ini menerapkan analisis komprehensif menggunakan kelima jenis tindak tutur Searle (asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif), sehingga mampu memetakan dinamika pendapat umum yang lebih bebas, beragam, dan utuh dibandingkan studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur Searle karena teori ini memberikan kerangka untuk mengklasifikasikan dan memahami berbagai jenis tindak tutur yang ditemukan dalam komunikasi daring, sekaligus memungkinkan identifikasi jenis tindak tutur yang paling dominan digunakan oleh warganet. Dengan menitikberatkan pada praktik berbahasa dalam interaksi sosial digital, penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang partisipasi politik masyarakat di media sosial. Penelitian ini juga relevan untuk memahami bagaimana masyarakat mengekspresikan sikap dan penilaian terhadap isu netralitas ASN,

serta bagaimana fenomena ini mencerminkan dinamika komunikasi politik dalam ruang publik digital yang semakin penting pada setiap penyelenggaraan pemilu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis tindak tutur apa yang digunakan serta bagaimana interpretasi fungsi dan makna tindak tutur yang digunakan oleh warganet dalam komentar *Facebook* postingan KASN tentang pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019?
2. Jenis tindak tutur apa yang paling dominan serta bagaimana interpretasi dominasi tindak tutur yang digunakan oleh warganet dalam komentar *Facebook* postingan KASN tentang pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis tindak tutur serta menginterpretasikan fungsi dan makna tindak tutur yang digunakan oleh warganet dalam komentar *Facebook* postingan KASN tentang pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019.
2. Menganalisis jenis tindak tutur yang paling dominan dan menjelaskan interpretasi dominasi jenis tindak tutur yang digunakan oleh warganet dalam komentar *Facebook* postingan KASN tentang pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini memberikan sumbangan teoretis pada bidang pragmatik dengan mendeskripsikan dan memetakan secara empiris bentuk-bentuk realisasi dari lima jenis tindak tutur ilokusi Searle (khususnya asertif, direktif, dan ekspresif) dalam konteks wacana politik digital di media sosial Indonesia. Hasil analisis



ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana teori tindak tutur dapat diaplikasikan untuk membongkar fungsi bahasa sebagai tindakan sosial dalam merespons isu etika birokrasi publik.

- b. Penelitian ini memperluas kajian sosiopragmatik dengan menyajikan analisis interpretatif terhadap pola dominasi jenis tindak tutur. Temuan mengenai dominasi tindak tutur asertif yang diikuti oleh tindak tutur ekspresif memberikan wawasan teoretis baru tentang bagaimana sikap kolektif publik, dalam hal ini sikap yang kritis, evaluatif, sekaligus terlibat secara emosional, terkonstruksi dan terefleksi melalui frekuensi penggunaan tindak tutur tertentu dalam wacana sosial-politik.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dan metodologis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji fenomena bahasa, partisipasi politik, dan interaksi publik dalam konteks media sosial yang terus berkembang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi lembaga pemerintah, seperti KASN dan Bawaslu, serta praktisi komunikasi publik mengenai ragam bentuk tindak tutur yang digunakan warganet. Dengan mengidentifikasi bagaimana publik menyuarakan opini, baik melalui penilaian kritis (asertif), tuntutan langsung (direktif), maupun sarkasme dan luapan emosi (ekspresif), lembaga terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa mengenai reaksi masyarakat. Dengan demikian, respons terhadap "suara publik" dapat dilakukan secara lebih efektif, tidak hanya memandangnya sebagai sentimen positif atau negatif semata, tetapi sebagai representasi kompleks dari dinamika opini sosial.
- b. Hasil analisis mengenai jenis tindak tutur yang paling dominan menyediakan data empiris mengenai sikap kolektif publik terhadap isu netralitas ASN. Dengan mengetahui bahwa sikap yang paling menonjol adalah kritis dan evaluatif (dominasi asertif), temuan ini dapat menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan advokat pemilu. Informasi ini berguna untuk merancang kampanye sosialisasi atau advokasi yang lebih tepat sasaran, karena kini mereka memahami bahwa publik merespons isu ini tidak hanya secara emosional, tetapi juga dengan argumentasi dan penegasan norma.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

**Penelitian relevan yang pertama** dikaji oleh Hidayatul Mahmudah (2021) dengan judul “Strategi Tindak Tutur Penerimaan dan Penolakan Warganet dalam Komentar *Instagram* @kemenkes\_ri tentang Vaksinasi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk strategi tindak tutur yang mencerminkan sikap penerimaan maupun penolakan, serta untuk mengetahui bentuk kesantunan yang muncul dalam komentar warganet terhadap unggahan akun resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di *Instagram*. Analisis terhadap komentar warganet menggunakan teori tindak tutur Searle (1969) dan teori kesantunan berbahasa Brown dan Levinson (1987). Mahmudah menemukan bahwa komentar warganet terbagi ke dalam dua kecenderungan, yaitu penerimaan (dukungan, apresiasi, dan rasa syukur) dan penolakan (keraguan, ketidakpercayaan, serta isu negatif tentang vaksin). Selain itu, strategi kesantunan berbahasa tampak dalam komentar, baik melalui pilihan kata sopan, humor, maupun mitigasi, meskipun terdapat pula komentar yang cenderung keras dan langsung. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa media sosial merupakan ruang ekspresi publik yang menampilkan keragaman sikap masyarakat terhadap isu kebijakan pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mahmudah (2021) adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menerapkan teori tindak tutur Searle sebagai salah satu kerangka analisis utama. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji komentar warganet di media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) sebagai respons terhadap unggahan lembaga resmi pemerintah (Kementerian Kesehatan dan KASN). Perbedaan mendasar terletak pada fokus analisis dan kerangka teori tambahan. Penelitian Mahmudah (2021) berfokus spesifik pada strategi penerimaan dan penolakan serta turut menganalisis kesantunan berbahasa menggunakan teori Brown dan Levinson. Sebaliknya, penelitian ini tidak mengkaji kesantunan, melainkan berfokus pada (1) pengidentifikasian kelima jenis tindak tutur ilokusi (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif) dan (2) penganalisisan jenis tindak tutur yang paling dominan digunakan oleh warganet. Konteks isunya pun berbeda, di mana

penelitian relevan tersebut mengkaji isu kesehatan publik (vaksinasi), sementara penelitian ini mengkaji isu etika birokrasi dan politik (netralitas ASN).

**Penelitian relevan yang kedua** dikaji oleh Oktaviani, R. (2022) dengan judul “Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif Warganet Mengenai PPKM di *Instagram* Liputan6.com”. Penelitian ini mengkaji bagaimana warganet menggunakan tindak tutur direktif dan ekspresif dalam komentar-komentar pada akun *Instagram* Liputan6.com terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana warganet mengekspresikan sikap, ajakan, perintah, serta emosi mereka melalui komentar dalam konteks sosial dan kebijakan publik selama masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data berupa komentar pada akun *Instagram* Liputan6.com. Analisis dilakukan menggunakan teori tindak tutur Searle, dengan fokus pada direktif (ajakan/perintah) dan ekspresif (ungkapan emosi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa warganet menggunakan tindak tutur direktif untuk mengajak menaati protokol kesehatan dan memberi saran terkait PPKM, sedangkan tindak tutur ekspresif dipakai untuk menyatakan perasaan seperti kekhawatiran, kekecewaan, maupun dukungan. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial menjadi ruang publik untuk menyampaikan sikap dan respon emosional terhadap isu kebijakan pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Oktaviani (2022) adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori tindak tutur Searle sebagai kerangka analisis. Objek kajiannya pun serupa, yaitu komentar warganet di media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) sebagai respons terhadap isu publik yang penting. Perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup analisis. Penelitian Oktaviani (2022) secara spesifik membatasi kajiannya hanya pada tindak tutur direktif dan ekspresif. Sebaliknya, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pertama-tama menganalisis kelima jenis tindak tutur ilokusi (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif) , dan kedua, mengidentifikasi jenis tindak tutur yang paling dominan. Selain itu, konteks isu yang dibahas juga berbeda, di mana penelitian relevan tersebut berfokus pada kebijakan kesehatan publik (PPKM) , sementara penelitian ini berfokus pada isu etika birokrasi dan politik (netralitas ASN).

**Penelitian relevan yang ketiga** dikaji oleh Siti Haryani (2022) berjudul “Tindak Tutur pada Tayangan TV ‘Lapor Pak!’ Episode ‘Interogasi Uus’” membahas bagaimana tindak tutur digunakan oleh tokoh Uus dalam sebuah

tayangan televisi komedi. Permasalahan utama yang diangkat adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur dan fungsi komunikatifnya dalam konteks interaksi dialogis yang berlangsung di acara tersebut, khususnya bagaimana Uus menyampaikan pesan-pesan melalui tuturan yang bersifat humor dan interaktif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis wacana. Data berupa tuturan Uus diambil dari rekaman dan transkrip, lalu dianalisis menggunakan teori tindak tutur Austin dan Searle. Analisis difokuskan pada tiga level tindak tutur, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 data tuturan, di mana 11 tuturan termasuk ke dalam fungsi ilokusi. Jenis ilokusi yang ditemukan meliputi asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun dalam konteks hiburan, tuturan tetap memiliki makna pragmatik dan berfungsi membangun interaksi efektif antara tokoh dan penonton. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Haryani (2022) adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menerapkan teori tindak tutur dari Austin dan Searle sebagai landasan analisis. Keduanya juga mengidentifikasi berbagai jenis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, dan ekspresif. Perbedaan mendasar terletak pada objek, konteks, dan fokus analisis. Penelitian Haryani (2022) mengkaji data lisan yang terstruktur (dialog dalam tayangan komedi TV), sementara penelitian ini mengkaji data tertulis yang spontan (komentar warganet di *Facebook*) dalam konteks wacana politik. Selain itu, fokus analisis Haryani (2022) mencakup tiga level tindak tutur (lokusi, ilokusi, dan perlokusi). Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan analisis secara spesifik pada klasifikasi kelima jenis tindak tutur ilokusi menurut Searle untuk menjawab rumusan masalah pertama, serta mengidentifikasi jenis yang paling dominan untuk menjawab rumusan masalah kedua, sebuah fokus yang tidak menjadi tujuan utama dalam penelitian relevan tersebut.

**Penelitian relevan yang keempat** dikaji oleh Wihdatul Af'al (2023) berjudul "Tindak Tutur Asertif Guru dalam Sosialisasi Program PAUD kepada Orang Tua Siswa di TK Kuncup Mekar Pitulua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara" yang mengkaji bagaimana guru menggunakan tindak tutur asertif dalam proses sosialisasi program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada orang tua siswa. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan fungsi tindak tutur asertif digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi, meyakinkan, dan membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua dalam konteks edukasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif dengan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan. Analisis dilakukan berdasarkan teori tindak tutur Searle, khususnya jenis asertif yang berfungsi menyatakan, menjelaskan, dan meyakinkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan tindak tutur asertif dalam bentuk penyampaian fakta, penjelasan manfaat, serta penegasan pentingnya program PAUD. Tuturan ini efektif membangun kepercayaan, memotivasi orang tua, serta menyesuaikan diri dengan respons audiens sehingga tercipta komunikasi yang dinamis dan responsif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Af'al (2023) adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menerapkan teori tindak tutur Searle sebagai kerangka analisis utama. Kedua penelitian juga sama-sama menganalisis fungsi dari tindak tutur asertif dalam sebuah konteks komunikasi. Perbedaan utama terletak pada konteks, data, dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Af'al (2023) berfokus pada konteks komunikasi edukasi yang formal dan lisan (sosialisasi guru kepada orang tua) dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji konteks wacana politik digital di *Facebook* yang bersifat spontan, tertulis, dan cenderung egaliter. Selain itu, ruang lingkup penelitian Af'al (2023) terbatas hanya pada tindak tutur asertif, sementara penelitian ini mengidentifikasi kelima jenis tindak tutur ilokusi untuk menjawab rumusan masalah pertama dan selanjutnya menganalisis jenis yang paling dominan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

**Penelitian relevan yang kelima** dikaji oleh Titin Ernawati dan Herman Wijaya (2023) dengan judul "Dialog Kebangsaan dalam Wasiat Renungan Massa: Kajian Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi" membahas makna komunikasi dalam teks naratif Wasiat Renungan Massa melalui analisis tindak tutur. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tuturan yang terkandung dalam teks tersebut merefleksikan pesan kebangsaan melalui tiga dimensi tindak tutur, yaitu lokusi (apa yang diucapkan), ilokusi (fungsi ujaran), dan perlokusi (dampak ujaran terhadap pendengar). Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana dialog kebangsaan dapat dikonstruksi secara komunikatif melalui bahasa tertulis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis wacana. Data berupa kutipan dari teks dianalisis menggunakan teori tindak tutur Austin dan Searle, serta memperhatikan konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat lokusi teks menyampaikan fakta dan pesan moral, pada tingkat ilokusi dominan

ditemukan tindak tutur asertif dan direktif, sedangkan pada tingkat perlokusi teks menimbulkan efek emosional dan motivasi kebangsaan bagi pembaca. Temuan ini menegaskan bahwa Wasiat Renungan Massa merupakan dialog kebangsaan yang komunikatif dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi sikap serta pemikiran pembaca. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernawati & Wijaya (2023) adalah keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menerapkan teori tindak tutur (Austin dan Searle) sebagai landasan teoretis utama. Kedua penelitian juga berfokus pada analisis fungsi ilokusi dari sebuah teks, seperti mengidentifikasi tindak tutur asertif dan direktif. Perbedaan mendasar terletak pada objek, konteks, dan ruang lingkup analisis. Penelitian relevan tersebut mengkaji teks naratif formal ("Wasiat Renungan Massa") dalam konteks wacana kebangsaan yang statis. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji tuturan warganet yang spontan, interaktif, dan dinamis di platform media sosial *Facebook* sebagai respons langsung terhadap isu sosial-politik. Selain itu, penelitian Ernawati & Wijaya juga menganalisis ketiga level tindak tutur (lokusi, ilokusi, dan perlokusi), sementara penelitian ini memfokuskan analisis secara spesifik pada klasifikasi lima jenis ilokusi Searle untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan selanjutnya mengidentifikasi jenis yang paling dominan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

**Penelitian relevan yang keenam** dikaji oleh Dwi Aprilia, Fajar Setiawan, dan Firmansyah (2024) berjudul "Analisis Tindak Tutur Ekspresif Warganet dalam Komentar *Instagram* @Gibran\_Rakabuming" bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh warganet dalam merespons unggahan akun resmi milik Gibran Rakabuming di *Instagram*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan publik dalam wacana politik di media sosial, yang tercermin dari beragam ekspresi emosi, pujian, kritik, maupun dukungan terhadap tokoh politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data berupa komentar warganet yang dikumpulkan, direduksi, dan diklasifikasikan. Analisis didasarkan pada teori tindak tutur Searle (1979), khususnya pada jenis ekspresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar warganet banyak mengandung tindak tutur ekspresif berupa pujian, motivasi, nasihat, serta ungkapan rasa senang. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang kritik, tetapi juga sarana dukungan emosional bagi tokoh politik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aprilia dkk. (2024) adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan pragmatik

dengan teori tindak tutur Searle (1979) sebagai kerangka analisis utama. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengambil data berupa tuturan spontan warganet dalam konteks wacana politik di media sosial (*Instagram* dan *Facebook*). Perbedaan mendasar terletak pada fokus dan ruang lingkup analisis. Penelitian Aprilia dkk. (2024) secara spesifik hanya mengkaji satu jenis tindak tutur, yaitu ekspresif. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan bertujuan untuk mengidentifikasi kelima jenis tindak tutur ilokusi (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif) untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan selanjutnya menganalisis jenis tindak tutur yang paling dominan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Perbedaan juga terletak pada objek konteksnya: penelitian relevan tersebut mengkaji akun personal tokoh politik, sedangkan penelitian ini mengkaji akun lembaga resmi (KASN) terkait isu pelanggaran etika birokrasi.

Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif serta penerapan teori tindak tutur Searle sebagai kerangka analisis utama. Sama seperti penelitian Mahmudah (2021), Oktaviani (2022), Aprilia dkk. (2024), maupun Af'al (2023), penelitian ini berfokus pada bagaimana tindak tutur dapat mencerminkan sikap, emosi, atau maksud komunikatif penutur. Kesamaan lain adalah penggunaan data berupa tuturan publik, baik dalam komentar media sosial, dialog hiburan, maupun teks tertulis, yang sama-sama dianalisis sebagai bentuk praktik komunikasi nyata di masyarakat. Namun, penelitian ini juga memiliki sejumlah perbedaan penting. Pertama, dari segi objek kajian, penelitian sebelumnya umumnya meneliti tindak tutur pada konteks hiburan (Haryani, 2022), pendidikan (Af'al, 2023), kebijakan publik (Mahmudah, 2021; Oktaviani, 2022), maupun wacana kebangsaan (Ernawati & Wijaya, 2023). Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti komentar warganet di *Facebook* tentang kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019, sehingga lebih erat kaitannya dengan isu sosial-politik kontemporer.

Kedua, dari aspek jenis tindak tutur, sebagian penelitian terdahulu membatasi kajian pada jenis tertentu, misalnya tindak tutur ekspresif (Aprilia dkk., 2024) atau asertif (Af'al, 2023). Ada pula yang menitikberatkan pada direktif dan ekspresif (Oktaviani, 2022). Sebaliknya, penelitian ini mengkaji kelima jenis tindak

tutur menurut Searle (representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif), sehingga cakupannya lebih luas.

Ketiga, dari segi konteks sosial, penelitian ini berbeda karena data diambil dari komentar warganet yang bersifat spontan, egaliter, dan tidak terikat aturan formal komunikasi politik, berbeda dengan penelitian Aini (2023) yang menganalisis talk show politik formal, atau Purwanita (2015) yang mengkaji iklan politik berbahasa Jawa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana publik memaknai dan merespons isu pelanggaran etika birokrasi melalui media sosial. Dengan persamaan dan perbedaan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian tindak tutur, khususnya pada ranah komunikasi digital politik, serta menghadirkan gambaran empiris mengenai sikap masyarakat terhadap netralitas ASN dalam pemilu.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pragmatik**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pragmatik**

Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam pragmatik, makna tidak hanya ditentukan oleh struktur kalimat, tetapi juga konteks sosial, budaya, dan situasional di mana komunikasi terjadi. Hal ini mencakup analisis terhadap unsur-unsur seperti latar tempat, waktu, partisipan, tujuan komunikasi, dan media yang digunakan. Pragmatik berfokus pada makna kontekstual yang dapat bervariasi tergantung pada situasi dan interaksi antara penutur dan pendengar (Maujud, 2019:10).

Pragmatik juga berhubungan erat dengan sosiolinguistik, yang mengkaji variasi bahasa dalam konteks sosial. Dalam hal ini, pragmatik mempelajari bagaimana konteks sosial mempengaruhi penggunaan bahasa dan bagaimana makna dapat berubah berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan budaya. Kajian pragmatik di Indonesia semakin berkembang dengan fokus pada konteks budaya lokal (Maujud, 2019:11), sehingga menghasilkan kajian pragmatik yang berbasis kultur spesifik.

Dalam era digital saat ini, muncul bidang baru yang dikenal sebagai *cyberpragmatics*, yang mengkaji interaksi bahasa dalam konteks media sosial dan



komunikasi daring (Fatmawati & Ningsih, 2024:1721). Hal ini menunjukkan bahwa pragmatik terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan cara orang berkomunikasi.

Secara keseluruhan, pragmatik adalah disiplin yang kompleks dan dinamis yang mencakup berbagai aspek komunikasi manusia. Dengan memahami pragmatik (Maujud, 2019:12), kita dapat lebih baik memahami bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam berbagai situasi komunikasi.

Pragmatik memainkan peran penting dalam komunikasi sehari-hari dengan mempengaruhi cara kita memahami dan menafsirkan pesan. Diantaranya melalui Konteks: Pragmatik menekankan pentingnya konteks dalam komunikasi (Rama, 2010:24). Konteks mencakup situasi fisik, latar belakang budaya, dan hubungan antara penutur dan pendengar. Misalnya, ungkapan seperti “Bisa tolong tutup jendela?” dapat diartikan sebagai permintaan yang sopan dalam konteks tertentu, tetapi bisa juga dianggap sebagai perintah jika diucapkan dengan nada yang tegas. Tanpa mempertimbangkan konteks, komunikasi dapat menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Implikatur: Pragmatik juga berkaitan dengan implikatur, yaitu makna yang tidak diungkapkan secara langsung tetapi dapat dipahami dari konteks. Contohnya, jika seseorang mengatakan “Cuaca hari ini sangat panas,” itu bisa berarti mereka ingin agar jendela dibuka atau pendingin ruangan dinyalakan. Implikatur ini menunjukkan bahwa komunikasi sering kali memerlukan penafsiran yang lebih dalam dari pendengar (Maujud, 2019:16).

Norma Sosial: Dalam banyak budaya, cara kita berbicara dan berinteraksi sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Misalnya, dalam budaya tertentu, berbicara langsung dianggap kurang sopan, sementara di budaya lain, kejelasan dan ketegasan sangat dihargai. Dengan memahami norma-norma ini, kita dapat menyesuaikan cara berbicara agar lebih sesuai dengan harapan sosial, menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menghindari konflik.

Tindakan Ujaran: Pragmatik juga berfokus pada tindakan ujaran (*speech acts*), yaitu tindakan yang dilakukan melalui ucapan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan “Saya berjanji akan membantu Anda,” mereka tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melakukan tindakan janji yang memiliki implikasi moral dan sosial. Memahami tindakan ujaran ini penting dalam

komunikasi karena dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan ditanggapi oleh pendengar (Maujud, 2019:17).

Pragmatik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana makna dibentuk dalam komunikasi sehari-hari. Dengan mempertimbangkan konteks, implikatur, norma sosial, dan tindakan ujaran, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam interaksi sosial kita.

### **2.2.1.2 Aspek-Aspek Pragmatik**

#### **2.2.1.2.1 Konteks dalam Makna Tuturan**

Pragmatik menekankan bahwa makna tuturan tidak hanya bergantung pada struktur linguistik, tetapi juga pada konteks situasional. Konteks mencakup latar tempat, waktu, hubungan sosial penutur-mitra tutur, dan tujuan komunikasi. Misalnya, tuturan “Bisa tolong tutup jendela?” tidak hanya bermakna literal, tetapi juga mengandung permintaan sopan yang disesuaikan dengan hierarki sosial antara penutur dan mitra tutur (Rahardi, 2021:90), menyatakan bahwa konteks ekstralinguistik menjadi penentu utama dalam interpretasi makna, termasuk asumsi bersama dan norma budaya yang berlaku.

Dalam kajian pragmatik, konteks memegang peranan krusial dalam memahami makna tuturan. Makna sebuah ujaran tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang digunakan, tetapi juga situasi dan kondisi saat tuturan tersebut terjadi (Rama, 2010:25). Faktor-faktor seperti siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan ditujukan, di mana, dan kapan percakapan berlangsung, serta bagaimana intonasi dan ekspresi yang digunakan, semuanya berkontribusi dalam menafsirkan maksud sebenarnya dari sebuah ujaran. Tanpa mempertimbangkan konteks, komunikasi dapat menjadi ambigu atau bahkan disalahartikan.

Pemahaman terhadap konteks juga mencakup aspek-aspek seperti kondisi psikologis peserta tutur dan motif di balik tuturan. Misalnya, intonasi dan ekspresi wajah penutur dapat memberikan petunjuk tambahan tentang maksud sebenarnya dari sebuah ujaran (Maujud, 2019:16). Selain itu, konteks dapat membantu menyingkirkan makna-makna yang tidak relevan, sehingga mendukung keberhasilan interpretasi tuturan tersebut.

Dengan demikian, konteks merupakan elemen esensial dalam pragmatik yang memungkinkan penutur dan pendengar untuk saling memahami maksud dan tujuan di balik setiap tuturan. Tanpa pemahaman konteks yang tepat, komunikasi berisiko mengalami kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru.

#### **2.2.1.2.2 Tindak Tutur (*Speech Acts*)**

Tindak tutur merupakan aspek kunci dalam pragmatik yang mengkaji bagaimana ujaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan. Austin (1975:95) membagi tindak tutur menjadi tiga: lokusi (makna literal), ilokusi (maksud penutur), dan perlokusi (efek pada pendengar). Contohnya, ujaran “Saya berjanji akan datang” tidak hanya menginformasikan janji, tetapi juga menciptakan komitmen moral. Saifudin (2019:12) menambahkan bahwa pemahaman tindak tutur memerlukan analisis niat penutur dan respons mitra tutur dalam interaksi nyata.

Tindak tutur, atau *speech acts*, merupakan konsep sentral dalam pragmatik yang mengkaji bagaimana tindakan dilakukan melalui ucapan. Menurut (Novianti dkk., 2022:12), tindak tutur terbagi menjadi tiga kategori: tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi merujuk pada tindakan menyatakan sesuatu secara harfiah, di mana makna yang disampaikan sesuai dengan kata-kata yang digunakan. Misalnya, ketika seseorang berkata “Pintu terbuka,” mereka hanya menyampaikan informasi tanpa maksud lain. Dalam konteks ini, pemahaman makna harfiah sangat penting untuk menginterpretasi tuturan secara tepat (Ayuri dkk., 2018: 34-36).

Pemahaman terhadap tindak tutur sangat penting dalam interaksi sehari-hari, karena makna sebuah ujaran tidak hanya bergantung pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga pada konteks dan maksud di baliknya. Misalnya, kalimat “Apakah Anda bisa menutup jendela?” secara harfiah adalah pertanyaan tentang kemampuan, tetapi secara ilokusi merupakan permintaan untuk menutup jendela. Dengan memahami jenis-jenis tindak tutur, kita dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dan menginterpretasikan maksud di balik ujaran orang lain (Ilmiyyah & Rohaedi, 2021: 56-58).

#### **2.2.1.2.3 Implikatur dan Prinsip Kooperatif**

Implikatur merujuk pada makna tersirat yang dihasilkan melalui pelanggaran prinsip kooperatif Grice. Prinsip ini mencakup empat maksim:

kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Misalnya, jawaban “Saya sudah makan” atas pertanyaan “Mau makan malam?” mengimplikasikan penolakan tanpa diungkapkan langsung. (Suhartono, 2020:43) menjelaskan bahwa implikatur konvensional (misalnya penggunaan kata “tetapi” untuk kontras) dan implikatur percakapan (makna berdasarkan konteks) menjadi dasar komunikasi efektif.

Dalam kajian pragmatik, implikatur merujuk pada makna tersirat yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam tuturan (Sulistyowati, 2014: 27-29), tetapi dapat dipahami melalui konteks percakapan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh H.P. Grice, yang membedakan antara implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Menurut Grice (1975:44-45), Implikatur konvensional ditentukan oleh makna leksikal dari kata-kata yang digunakan, sementara implikatur terbentuk melalui pemahaman atas konteks situasi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kerja sama dalam komunikasi.

#### **2.2.1.2.4 Sosiopragmatik**

Sosiopragmatik memadukan kajian pragmatik dengan sosiolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu. Leech (2016) menekankan bahwa norma sosial, seperti kesantunan dan hierarki, memengaruhi pemilihan tuturan. Misalnya, penggunaan bahasa slang seperti “Hundo P” (100%) dalam kalangan remaja AS mencerminkan identitas kelompok sosial. (Hasan dkk., 2022:45) menambahkan bahwa sosiopragmatik mengkaji bagaimana konteks lokal (misalnya budaya Jawa) membentuk strategi komunikasi.

Dalam kajian pragmatik, sosiopragmatik merupakan cabang ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu, menggabungkan aspek-aspek sosiologi dan pragmatik untuk memahami bagaimana situasi sosial mempengaruhi makna tuturan. Menurut (Jatmiko, 2021:19) sosiopragmatik berfokus pada penggunaan bahasa dalam masyarakat budaya dalam situasi sosial tertentu.

Sosiopragmatik lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalis yang cenderung mengabaikan variasi bahasa berdasarkan faktor sosial. (Hasan dkk., 2022:47-50) mengemukakan dua prinsip yang mendukung penggunaan sosiopragmatik, yaitu Prinsip Pergeseran Makna (*The Principle of Style Shifting*) dan Prinsip Perhatian (*The Principle of Attention*). Prinsip pertama menyatakan bahwa tidak ada penutur yang memiliki satu gaya bahasa, karena setiap penutur

menggunakan berbagai bahasa dan menguasai pemakaiannya. Prinsip kedua menegaskan bahwa semakin sadar seseorang penutur terhadap apa yang diucapkan, semakin formal pula tuturannya.

Tujuan utama sosiopragmatik adalah meneliti fenomena komunikasi yang terjadi dalam situasi sosial tertentu. (Hasan dkk., 2022:51) menekankan bahwa sosiopragmatik berfokus pada penggunaan bahasa (*language use*) dalam masyarakat budaya, memperhatikan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa.

#### **2.2.1.2.5 Prinsip Kerja Sama**

Agar komunikasi efektif, penutur dan mitra tutur harus mematuhi prinsip kerja sama, seperti kesesuaian topik dan kejelasan tuturan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini (misalnya menyimpang dari topik) dapat menimbulkan kesalahpahaman. (Fadli & Kasmawati, 2020:63) menegaskan bahwa strategi tuturan, seperti penggunaan metafora atau eufemisme, sering kali disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan budaya mitra tutur.

Dalam kajian pragmatik, Prinsip Kerja Sama (*Cooperative Principle*) yang diperkenalkan oleh H.P. Grice adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana peserta percakapan berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mencapai komunikasi yang optimal. Prinsip ini menekankan bahwa penutur dan pendengar harus bekerja sama untuk memastikan percakapan berjalan lancar dan tujuan komunikasi tercapai (Levinson, 1983:101).

### **2.2.2 Tindak Tutur**

Teori tindak tutur yang dikemukakan oleh John L. Austin merupakan salah satu kontribusi paling signifikan dalam bidang pragmatik. Dalam bukunya yang terkenal, *How to Do Things with Words* (Maujud, 2019:65), Austin memperkenalkan gagasan bahwa ketika seseorang berbicara, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan (Maujud, 2019:65). Ia membedakan antara dua jenis tuturan: konstatif dan performatif. Tuturan konstatif adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, sedangkan tuturan performatif adalah pernyataan yang melibatkan tindakan, seperti berjanji atau meminta. Austin berargumen bahwa untuk memahami sepenuhnya makna dari sebuah tuturan, penting untuk mempertimbangkan konteks di mana tuturan tersebut diucapkan (Ilmiyyah & Rohaedi, 2021:55-57).

Austin lebih lanjut membagi tindak tutur menjadi tiga kategori utama: tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi merujuk pada tindakan menyampaikan informasi secara literal, seperti menyatakan fakta atau menanyakan sesuatu. Misalnya, ketika seseorang mengatakan “Pintu terbuka,” mereka hanya menyampaikan informasi tanpa maksud lain. Tindak ilokusi berkaitan dengan maksud atau tujuan yang ingin dicapai penutur melalui tuturan tersebut, seperti meminta atau menawarkan sesuatu. Misalnya, “Bisa tolong tutup jendela?” bukan hanya sekadar pernyataan melainkan juga permintaan. Sedangkan tindak perlokusi berfokus pada efek atau dampak dari tuturan terhadap pendengar, seperti mempengaruhi tindakan atau reaksi (Titin Ernawati & Herman Wijaya, 2023: 652-664).

Austin juga mengemukakan konsep kondisi kebahagiaan (*felicity conditions*) yang harus dipenuhi agar sebuah tindak tutur performatif dapat dianggap sah. Misalnya, untuk menganggap sebuah janji sebagai sah, penutur harus memiliki niat yang tulus untuk memenuhi janji tersebut. Jika tidak, maka janji itu tidak akan memiliki kekuatan performatif. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keikhlasan penutur sangat penting dalam komunikasi (Maujud, 2019:19).

Teori tindak tutur Austin telah memberikan dasar bagi banyak penelitian dalam pragmatik dan linguistik. Konsep-konsepnya telah diperluas dan dikembangkan oleh muridnya, John Searle (1979), yang melanjutkan kajian tentang tindak tutur dengan menambahkan dimensi baru dalam analisis komunikasi. Searle mengembangkan klasifikasi lebih lanjut mengenai tindak ilokusi dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana konteks sosial memengaruhi makna tuturan (Saifudin, 2019:7). Dengan demikian, teori tindak tutur Austin tidak hanya memberikan wawasan baru tentang penggunaan bahasa tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi manusia melalui bahasa.

Konsep Dasar Teori Tindak Tutur Austin membagi tindak tutur menjadi dua jenis utama, yaitu: (1) Ujaran Konstatif: Ujaran yang menyatakan suatu fakta dan dapat dinilai benar atau salah (2) Ujaran Performatif: Ujaran yang tidak hanya menyatakan sesuatu tetapi juga melakukan suatu tindakan, seperti janji, perintah, atau permintaan. Searle kemudian mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa setiap tuturan memiliki struktur yang lebih kompleks dan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori (Saifudin, 2019:8).

Teori tindak tutur banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti hukum, politik, pendidikan, dan komunikasi bisnis. Dalam ranah politik, misalnya, ujaran seorang pejabat bisa memiliki dampak ilokusi dan perlokusi yang signifikan terhadap masyarakat. Dalam pendidikan, seorang guru dapat menggunakan tindak tutur untuk memberikan instruksi, motivasi, atau kritik kepada siswa.

Teori Tindak Tutur (*Speech Act Theory*) yang dikembangkan oleh J.L. Austin (1975) dan disempurnakan oleh John Searle (Searle, 1979) menjadi pendekatan yang relevan dalam menganalisis penggunaan bahasa dalam interaksi di media sosial yang mengangkat isu aktual dan relevan khususnya dalam konteks politik dan birokrasi, termasuk dalam menanggapi kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kota Makassar. Austin memperkenalkan konsep bahwa ujaran tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu (*constative*) tetapi juga melakukan tindakan (*performative*). Ia membagi tindak tutur ke dalam tiga kategori utama: lokusi (tuturan dalam bentuk proposisi), ilokusi (tuturan dengan maksud tertentu), dan perlokusi (tuturan yang berdampak pada pendengar). Searle kemudian mengembangkan teori ini dengan membagi tindak ilokusi menjadi lima jenis: representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif (Saifudin, 2019:7).

Dalam analisis tindak tutur warganet dalam komentar *Facebook* postingan KASN tentang pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019, pendekatan teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana ujaran mereka merupakan persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN, yang terekspresi melalui komentar-komentar warganet di media sosial. Tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam postingan *Facebook* KASN tersebut menunjukkan bagaimana opini publik terbentuk dan disampaikan melalui media sosial, serta bagaimana bahasa digunakan untuk menyuarakan kritik, dukungan, atau sindiran. Selain itu, pendekatan teori ini dapat memperluas kajian linguistik terhadap fenomena kebahasaan dalam konteks demokrasi dan birokrasi publik, terutama dalam melihat bagaimana publik menyuarakan opini terhadap penyimpangan etika aparatur sipil negara. Dengan demikian, teori tindak tutur dapat menjadi alat analisis yang efektif dalam mengungkap opini publik dan persepsi masyarakat dalam komentar tersebut, terutama dalam konteks politik dan demokrasi.

Teori tindak tutur yang dikembangkan oleh Austin dan Searle memberikan wawasan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan tindakan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih peka dalam menafsirkan makna dan maksud di balik suatu ujaran serta dampaknya terhadap komunikasi sosial.

### **2.2.2.1 Jenis Tindak Tutur**

Teori tindak tutur yang dikemukakan oleh John L. Austin membagi tindakan berbahasa menjadi tiga jenis utama: tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi merujuk pada tindakan menyampaikan informasi secara literal. Dalam konteks ini, lokusi mencakup pengucapan kata-kata yang membentuk pernyataan atau pertanyaan tanpa mempertimbangkan makna atau dampaknya. Menurut Austin, pemahaman tentang tindak lokusi penting karena ini adalah dasar dari semua komunikasi, di mana makna harfiah dari tuturan harus dipahami sebelum melanjutkan ke aspek-aspek lain dari tindak tutur (Saifudin, 2019:7).

Tindak lokusi, atau *locutionary act*, merupakan jenis tindak tutur yang paling dasar, yang berfokus pada tindakan menyampaikan informasi secara literal. Dalam konteks ini, tindak lokusi melibatkan pengucapan kata-kata yang memiliki makna tertentu dan dapat dinilai benar atau salah berdasarkan konteksnya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan “Hari ini sangat panas,” mereka hanya menyampaikan informasi tanpa maksud lain. Austin (1975) menjelaskan bahwa tindak lokusi mencakup aspek-aspek seperti intonasi, struktur kalimat, dan referensi yang diperlukan untuk memahami makna dari tuturan tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang tindak lokusi sangat penting dalam analisis komunikasi karena menjadi dasar bagi tindak ilokusi dan perlokusi yang lebih kompleks (Maulidia dkk., 2022:93).

Tindak ilokusi, atau *illocutionary act*, adalah tindakan yang dilakukan penutur melalui ucapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, penutur tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga berusaha mencapai tujuan tertentu melalui tuturan tersebut. Austin (1975) mengidentifikasi beberapa jenis tindak ilokusi, seperti meminta, menawarkan, dan berjanji. Misalnya, ungkapan “Saya berjanji akan datang tepat waktu” tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan komitmen dari penutur kepada pendengar. Tindak ilokusi sangat



bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana tuturan berlangsung, sehingga makna yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada situasi (Maulidia dkk., 2022:93-102). Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami tindak ilokusi secara efektif, pendengar harus mampu menafsirkan niat penutur berdasarkan konteks percakapan.

Tindak perlokusi, atau *perlocutionary act*, merujuk pada efek atau dampak dari tuturan terhadap pendengar. Dalam hal ini, tindak perlokusi mencakup reaksi yang ditimbulkan oleh ucapan penutur, seperti membujuk, mengejutkan, atau meyakinkan pendengar. Austin (1975) menjelaskan bahwa tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab-akibat antara tuturan yang diucapkan dan reaksi yang ditimbulkan pada pendengar. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan “Hati-hati di jalan,” dan pendengar merasa lebih waspada setelah mendengar ucapan tersebut, maka itu adalah contoh tindak perlokusi yang berhasil. Tindak perlokusi sering kali tidak dapat diprediksi sepenuhnya karena bergantung pada bagaimana pendengar menafsirkan dan merespons tuturan (Fatahuddin dkk., 2022:19).

Ketiga jenis tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi saling terkait dan membentuk keseluruhan proses komunikasi. Tindak lokusi memberikan dasar bagi tindak ilokusi untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan bahasa. Sementara itu, tindak ilokusi berfungsi untuk mengarahkan tindakan penutur dalam interaksi sosial dan menghasilkan efek tertentu pada pendengar melalui tindak perlokusi. Menurut Saifudin (2019:12), pemahaman tentang ketiga jenis tindak tutur ini penting untuk menganalisis bagaimana makna dibentuk dalam komunikasi sehari-hari serta bagaimana interaksi sosial terjadi melalui bahasa.

Teori tindak tutur Austin memiliki implikasi yang luas dalam studi pragmatik dan linguistik. Dengan memahami jenis-jenis tindak tutur ini, kita dapat lebih baik menangkap nuansa komunikasi manusia dan bagaimana makna dapat berubah tergantung pada konteks dan niat penutur. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat membantu kita memahami dinamika interaksi sosial serta strategi komunikasi yang digunakan dalam berbagai situasi (Saifudin, 2019:2). Dengan demikian, teori tindak tutur tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang bahasa tetapi juga memberikan wawasan tentang perilaku manusia dalam konteks sosial.

### 2.2.2.2 Jenis Tindak Tutur menurut Searle

John Searle, seorang filsuf bahasa, mengembangkan teori tindak tutur yang mengklasifikasikan tindak ilokusi menjadi lima jenis: asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Setiap jenis tindak tutur ini memiliki fungsi komunikatif yang berbeda dan berperan dalam interaksi sosial (Saifudin, 2019:13).

Tindak tutur asertif adalah jenis tuturan yang digunakan untuk menyatakan atau mengklaim kebenaran dari suatu pernyataan. Dalam konteks ini, penutur berusaha meyakinkan pendengar tentang kebenaran pernyataannya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Hari ini sangat panas," mereka menyampaikan informasi yang dapat dinilai benar atau salah. Menurut Searle (1979), tindak asertif mencakup pernyataan, deskripsi, dan prediksi yang berhubungan dengan dunia nyata. Tindak ini sangat penting dalam komunikasi sehari-hari karena membentuk dasar dari banyak interaksi sosial di mana informasi dan pengetahuan dibagikan.

Tindak tutur direktif bertujuan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan dari pendengar. Dalam hal ini, penutur berusaha mempengaruhi mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu, seperti meminta atau memerintah. Contoh tindak direktif termasuk ungkapan seperti "Tolong tutup jendela" atau "Bisa kamu bantu saya?" Searle (1979) menjelaskan bahwa tindak direktif sering kali melibatkan kekuatan sosial di mana penutur berharap pendengar akan memenuhi permintaan tersebut. Tindak tutur ini mencerminkan dinamika kekuasaan dalam komunikasi dan menunjukkan bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mengarahkan tindakan orang lain (Retnaningsih, 2014:84).

Tindak tutur komisif adalah jenis tuturan di mana penutur mengikat dirinya untuk melakukan suatu tindakan di masa depan. Ini mencakup janji, sumpah, atau komitmen lainnya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan "Saya berjanji akan datang tepat waktu," mereka tidak hanya menyampaikan niat tetapi juga membuat komitmen yang mengikat diri mereka sendiri. Searle (1979) menekankan bahwa tindak komisif menciptakan harapan di pihak pendengar bahwa penutur akan memenuhi janjinya, sehingga menambah dimensi etika dalam komunikasi.

Tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengekspresikan sikap atau perasaan penutur terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu. Contohnya termasuk ucapan terima kasih, ucapan selamat, atau ungkapan belasungkawa. Dalam hal ini, penutur menyampaikan emosi atau reaksi psikologis mereka kepada

pendengar. Menurut Saifudin (2019:8), tindak ekspresif memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman emosional dan memperkuat hubungan interpersonal melalui komunikasi yang lebih personal.

Tindak tutur deklaratif adalah jenis tuturan yang dapat mengubah keadaan atau situasi hanya dengan mengucapkannya. Misalnya, ungkapan seperti “Saya menikahkan kalian” dalam konteks upacara pernikahan memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas baru hanya dengan kata-kata tersebut. Saifudin (2019:8) menjelaskan bahwa tindak deklaratif memerlukan konteks yang tepat dan pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat agar dapat dianggap sah dan efektif. Ini menunjukkan bagaimana bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga dapat menciptakan realitas baru melalui tindakan verbal.

Dengan memahami lima jenis tindak tutur menurut Searle, asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif kita dapat lebih menghargai kompleksitas komunikasi manusia dan bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk melakukan berbagai tindakan sosial.

### **2.2.2.3 Jenis Tindak Tutur berdasarkan cara penyampaian**

Jenis tindak tutur berdasarkan penyampaian dapat dibagi menjadi dua kategori utama: tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Pembagian ini didasarkan pada cara penutur menyampaikan maksudnya kepada mitra tutur.

Tindak tutur langsung adalah bentuk komunikasi di mana maksud penutur dinyatakan secara eksplisit melalui struktur kalimat. Dalam tindak tutur ini, hubungan antara bentuk tuturan dan fungsi komunikatifnya sangat jelas. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, “Tolong tutup pintu,” tuturan tersebut secara langsung berfungsi sebagai permintaan. Menurut Retnaningsih (2014:90) tindak tutur langsung sering digunakan dalam situasi formal atau ketika penutur ingin memastikan bahwa pesan mereka dipahami dengan jelas oleh mitra.

Sebaliknya, tindak tutur tidak langsung adalah bentuk komunikasi di mana maksud penutur disampaikan secara implisit, sehingga membutuhkan interpretasi dari mitra tutur. Misalnya, ungkapan “Di luar dingin sekali” dapat diartikan sebagai permintaan untuk menutup jendela, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Tindak tutur tidak langsung sering digunakan dalam situasi yang lebih santai atau ketika penutur ingin menjaga kesopanan dan menghindari konfrontasi. Strategi ini

memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi dan sering kali bergantung pada konteks sosial serta hubungan antara penutur dan pendengar.

Perbedaan antara tindak tutur langsung dan tidak langsung terletak pada tingkat eksplisitas tuturan dan kebutuhan akan interpretasi. Tindak tutur langsung cenderung lebih efektif dalam menyampaikan pesan dengan jelas, sedangkan tindak tutur tidak langsung lebih efektif dalam menjaga kesantunan atau mengurangi potensi konflik. Titin Ernawati & Herman Wijaya (2023) menjelaskan bahwa pemilihan strategi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, tujuan komunikasi, dan tingkat kedekatan antara penutur dan mitra tutur.

Dengan memahami jenis tindak tutur berdasarkan penyampaiannya, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan adaptif sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.

### **2.2.3 Netralitas ASN**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah prinsip fundamental dalam pemerintahan demokratis yang mengharuskan ASN bersikap profesional, independen, dan tidak berpihak dalam politik praktis. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan secara objektif tanpa adanya pengaruh politik tertentu. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN wajib menjaga netralitas dalam pemilu dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye atau dukungan kepada kandidat tertentu (Susilo Prabowoadi & Afandi, 2020:133).

Selain itu, konsep netralitas ASN berkaitan erat dengan etika birokrasi, yang mengacu pada standar moral dan prinsip yang mengatur perilaku pegawai negeri (Susilo Prabowoadi & Afandi, 2020:127). Etika birokrasi menekankan pada profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Prinsip ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga objektivitas dalam bekerja.

Dalam konteks pemilu, pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi dari (Fachri Adnan, 2023:94-102) menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak kredibilitas birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan

publik. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk memegang teguh prinsip netralitas demi menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Teori netralitas ASN didasarkan pada konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber (1947), yang menekankan bahwa birokrasi harus bersifat impersonal, berorientasi pada aturan, dan berlandaskan meritokrasi. ASN diharapkan menjalankan tugasnya secara objektif tanpa campur tangan politik, guna menjaga efektivitas dan kredibilitas institusi pemerintahan. Netralitas ASN juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak kepada partai politik atau kandidat dalam pemilu (Montheza dkk., 2024).

Dalam perspektif etika birokrasi, netralitas ASN erat kaitannya dengan nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Etika birokrasi mengacu pada standar moral dan prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Menurut (Fachri Adnan, 2023:94-102) ketika birokrasi menuntut ASN untuk mengedepankan kepentingan publik, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta menghindari penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.

Pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu, seperti yang terjadi dalam kasus lima belas camat di Kota Makassar pada Pemilu 2019, mencerminkan adanya deviasi dari prinsip birokrasi Weberian dan pelanggaran terhadap kode etik ASN. Dalam kasus ini, jika terbukti adanya keberpihakan camat kepada kandidat tertentu, maka mereka telah melanggar prinsip netralitas dan berpotensi mencederai integritas demokrasi. Ujaran yang disampaikan oleh camat tersebut dapat memiliki implikasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pemilih dan pegawai pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, penerapan teori netralitas ASN dan etika birokrasi dalam analisis kasus ini menjadi penting untuk memahami bagaimana komunikasi dalam birokrasi dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum. ASN harus selalu menjaga profesionalisme dengan menjunjung tinggi etika birokrasi serta memastikan bahwa tugas yang mereka jalankan bebas dari kepentingan politik, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

### 2.2.4 Facebook

*Facebook* merupakan salah satu platform media sosial terbesar di dunia yang memungkinkan penggunanya berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri dalam skala luas. Sejak diluncurkan pada tahun 2004, *Facebook* berkembang dari sekadar jejaring sosial untuk mahasiswa menjadi platform global dengan miliaran pengguna aktif. Kehadiran fitur komentar, berbagi (*share*), dan tanda suka (*like*) menjadikan *Facebook* bukan hanya wadah pertukaran pesan, melainkan juga arena pembentukan opini publik dan partisipasi sosial-politik (Ellison dkk., 2007:1167).

Dalam konteks kajian linguistik, *Facebook* menyediakan data otentik yang kaya untuk menganalisis praktik kebahasaan dalam interaksi digital. Komentar warganet di *Facebook* kerap memuat ekspresi sikap, kritik, dukungan, bahkan sarkasme, yang dapat dianalisis melalui pendekatan pragmatik seperti tindak tutur. Bahasa yang digunakan bersifat spontan, interaktif, dan sering kali dipengaruhi konteks sosial-politik yang sedang berlangsung. Hal ini menjadikan *Facebook* sebagai ruang diskursif yang merefleksikan dinamika komunikasi masyarakat kontemporer (Zappavigna, 2012:227).

Selain fungsi sosial, *Facebook* juga berperan penting dalam ranah politik dan pemerintahan. Berbagai lembaga pemerintah, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menggunakan *Facebook* untuk menyampaikan informasi resmi kepada publik. Respons masyarakat terhadap unggahan tersebut kemudian membentuk percakapan publik yang dapat memengaruhi persepsi terhadap isu tertentu, misalnya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu. Dengan demikian, *Facebook* berfungsi ganda: sebagai media komunikasi kelembagaan dan sebagai wadah partisipasi politik warga (Howard & Parks, 2012:4).

Lebih jauh, studi terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi politik di *Facebook* sering kali ditandai oleh keterlibatan publik yang egaliter dan relatif bebas dari batasan komunikasi formal. Warganet dapat langsung menyuarakan opini, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik, tanpa perantara. Hal ini menimbulkan interaksi horizontal antara warga dengan lembaga negara, sekaligus menciptakan ruang partisipasi politik digital yang lebih terbuka (Loader & Mercea, 2011: 765-766).

### 2.3 Kerangka Pikir

Bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan sarana untuk melakukan tindakan. Dalam kajian pragmatik, hal ini dikenal sebagai tindak tutur (*speech act*), yaitu suatu tuturan yang memiliki maksud tertentu dan dapat memengaruhi lawan tutur dalam suatu situasi komunikasi tertentu. Dalam konteks media sosial, seperti *Facebook*, tindak tutur muncul dalam bentuk komentar yang mencerminkan berbagai sikap, respon, serta pandangan warganet terhadap isu yang sedang dibahas.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada tindak tutur warganet dalam komentar *Facebook* terhadap postingan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019. Komentar-komentar tersebut merupakan bentuk nyata dari penggunaan bahasa sebagai tindakan, karena tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mengandung fungsi komunikatif seperti menyindir, menyalahkan, mendukung, memprotes, bahkan menyerukan tindakan tertentu. Untuk menganalisis fungsi dari tuturan tersebut, penelitian ini menggunakan teori tindak tutur John Searle, yang mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima jenis, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Komentar-komentar warganet yang dianalisis dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan lima jenis tindak tutur tersebut untuk mengungkap fungsi tuturan dan sikap warganet terhadap isu pelanggaran netralitas ASN. Melalui pendekatan ini, akan diketahui bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat untuk menyatakan sikap sosial-politik mereka, serta kecenderungan jenis tindak tutur yang paling dominan dalam merespons isu publik di media sosial.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menempatkan tindak tutur sebagai pusat analisis untuk memahami makna, fungsi, dan sikap dalam komunikasi digital warganet, khususnya dalam konteks isu politik yang melibatkan pelanggaran etika aparatur negara.

## KERANGKA PIKIR





## 2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah utama dalam penelitian secara spesifik dan aplikatif agar mudah diukur dan dianalisis dalam konteks penelitian. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dan dianggap sering digunakan dalam penelitian ini. Masing-masing istilah ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Tindak tutur dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk tindakan komunikasi yang diwujudkan melalui tuturan atau ujaran warganet dalam komentar *Facebook*. Dalam penelitian ini, tindak tutur diklasifikasikan berdasarkan teori John Searle (1979).
2. Warganet dalam penelitian ini diartikan sebagai pengguna aktif media sosial, dalam hal ini pengguna akun *Facebook* yang memberikan komentar pada unggahan KASN. Warganet dalam penelitian ini tidak diidentifikasi secara individu, melainkan dianalisis berdasarkan isi komentarnya.
3. Media sosial dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai platform digital interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan merespons konten secara publik. Secara khusus, media sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *Facebook*, yaitu jejaring sosial tempat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengunggah informasi mengenai pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019.
4. Komentar *Facebook* dalam penelitian ini diartikan sebagai respons tertulis yang dipublikasikan oleh warganet pada unggahan tertentu. Dalam penelitian ini, komentar yang dianalisis adalah komentar yang muncul pada unggahan *Facebook* resmi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019.
5. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penelitian ini diartikan sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019. KASN menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini karena akun resmi *Facebook*-nya digunakan untuk mempublikasikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para camat se-Kota Makassar.

6. Pelanggaran netralitas ASN dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan aparat sipil negara yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pelanggaran tersebut menjadi isu utama yang dikomentari oleh warganet.
7. Kasus pelanggaran para camat se-Kota Makassar terhadap netralisasi ASN pada Pemilu 2019 adalah peristiwa pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh lima belas camat aktif di Kota Makassar pada Pemilu 2019. Para camat tersebut secara terbuka menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden, yang terekam dalam video dan menyebar luas di media sosial. Kasus ini mendapat perhatian publik dan menjadi salah satu unggahan resmi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di akun *Facebook*-nya. Dalam konteks penelitian ini, kasus tersebut diposisikan sebagai pemicu munculnya komentar warganet, yang dianalisis sebagai jenis tindak tutur untuk melihat sikap, opini, dan respon masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN.
8. Asertif merujuk pada jenis tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menggambarkan suatu keadaan, menyampaikan informasi, atau menyatakan pendapat pembicara dengan tingkat keyakinan tertentu terhadap kebenaran proposisi yang diungkapkan.
9. Direktif sebagai salah satu jenis tindak tutur yang mengacu pada bentuk ujaran yang dimaksudkan untuk membuat pendengar melakukan sesuatu.
10. Deklaratif dapat dijabarkan sebagai jenis tindak tutur yang bertujuan untuk mengubah realitas sosial melalui ujaran yang diucapkan oleh penutur dengan wewenang institusional tertentu.
11. Ekspresif merujuk pada jenis tuturan yang digunakan oleh penutur untuk menyatakan sikap psikologis atau perasaan terhadap suatu keadaan, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pihak lain.
12. Komisif dapat dijabarkan sebagai jenis tindak tutur di mana penutur berjanji atau berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Intinya, penutur mengikatkan diri untuk melaksanakan tindakan yang diucapkan.